Value : Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 21 (2), Hal. 474 - 499
p-ISSN: 1979-0643
e-ISSN: 2685-7324
DOI: https://doi.org/10.32534/jv.v21i2.8634

JURNAL VALUE : Jurnal Manajemen dan Akuntansi
Journal homepage: https://e-journal.umc.ac.id/index.php/VL

Pengaruh GCG, Pengendalian Internal, Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dengan Moderasi Komite Audit

Muhammad Saddam Fahrezi[1]
Slamet Wahyudi[2]
[1]Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Email : muhammadsadamf12@gmail.com
[2]Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Email : muhammadsadamf12@gmail.com

Diterima: 11 Juni 2026 **Direview:** 18 Juni 2026 **Dipublikasikan:** 29 Juli 2026

Abstract

Financial statement fraud continues to pose a danger to the viability and integrity of businesses, underscoring the necessity of strong control systems to stop fraud. With the audit committee acting as a moderating variable, this study attempts to examine how the whistleblower system, internal control, and good corporate governance (GCG) affect the prevention of financial statement fraud. This study used a quantitative methodology using primary data gathered from 100 PT Pegadaian (Persero) employees via questionnaires. Convenience sampling was the method employed. Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 4.0 was used to evaluate the data. The findings show that both effective company governance and the whistleblower system have a positive and significant impact on preventing financial statement fraud. On the other hand, the audit committee and internal control have little impact. The audit committee does not moderate the link between the whistleblower system and GCG on financial statement fraud prevention, according to the moderating study. It does, however, considerably lessen the unfavorable link between financial statement fraud prevention and internal control. This study adds to the body of knowledge on fraud prevention by showing that formal oversight mechanisms through audit committees are not as important in preventing financial statement fraud as the efficacy of whistleblowing systems and the application of sound corporate governance.

Keywords: *Whistleblowing System, Internal Control, Good Corporate Governance, Audit Committee, Financial Statement Fraud Prevention.*

Abstrak

Mekanisme pengendalian yang kuat diperlukan buat mencegah kecurangan laporan keuangan sebab kecurangan ini masih merupakan ancaman bagi reputasi dan kelangsungan hidup bisnis. Whistleblowing system, pengendalian internal, dan good corporate governance (GCG) mempengaruhi pencegahan kecurangan laporan keuangan, dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada seratus karyawan PT Pegadaian (Persero). Convenience sampling ialah metode pengambilan sampel. Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dibantu oleh SmartPLS 4.0 dilangsungkan buat melakukan analisis data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem whistleblowing membantu mencegah kecurangan laporan keuangan dan GCG, tetapi pengendalian internal dan komite audit tidak melakukan apa-apa. Pengetestan moderasi memperlihatkan bahwa komite audit tidak bisa mengontrol hubungan whistleblowing system dan GCG terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan; sebaliknya, mereka melakukannya dengan cara yang negatif dan signifikan. Studi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem whistleblowing dan penerapan GCG lebih penting daripada mekanisme pengawasan formal melalui komite audit dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. Ini membantu perkembangan literatur pencegahan fraud.

Kata Kunci : Sistem Pelaporan Pelanggaran, Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Komite Audit, Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Di berbagai sektor industri di seluruh dunia, fenomena kecurangan masih menjadi salah satu ancaman utama bagi keberlangsungan Bisnis (Saikhu et al., 2025; Ramadhani & Trisnaningsih, 2023). Dalam *Occupational Fraud* 2024: *A Report to the Nations*, lembaga di seluruh dunia diperkirakan kehilangan sekitar 5% dari pendapatan tahunannya sebab penipuan, menurut laporan dari *Association of Certified Fraud Examiners* (Saikhu et al., 2025). *Fraud* tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan, menarik investor, dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (Wang et al., 2024; Ghozali et al., 2025; Saikhu et al., 2025). *Fraud* ialah tindakan yang dilangsungkan secara sengaja buat memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi, dan penyebaran informasi yang menyesatkan (Saikhu et al., 2025).

Menurut klasifikasi ACFE, *fraud* terdiri dari tiga jenis utama: penyalahgunaan aset, korupsi, dan penipuan laporan keuangan (Ghozali et al., 2025). Di antara ketiga jenis tersebut, *financial statement fraud* merupakan jenis *fraud* dengan frekuensi kejadian yang relatif lebih rendah namun menimbulkan kerugian ekonomi terbesar sebab dapat memengaruhi keputusan investor, kreditur, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya (Wang et al., 2024; Ghozali et al., 2025). Oleh sebab itu, upaya pencegahan *financial statement fraud* menjadi perhatian penting bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan (Lubis & Maisyarah, 2026; Ghozali et al., 2025; Sudjono, 2023). Di Indonesia, sektor jasa keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sektor yang punya tingkat risiko *fraud* yang relatif tinggi sebab karakteristik operasional yang kompleks, tingginya volume transaksi, serta pengelolaan aset dan dana masyarakat dalam jumlah besar (Saikhu et al., 2025; Mawardi et al., 2026).

Kompleksitas tersebut menuntut perusahaan buat punya mekanisme pengawasan dan tata kelola yang efektif guna meminimalkan peluang terjadinya kecurangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan (Saikhu et al., 2025; Pratiwi & Nugroho, 2025). Sebagai salah satu BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan, PT Pegadaian punya karakteristik operasional yang kompleks sebab mengelola layanan gadai, pembiayaan mikro, investasi emas, serta berbagai layanan keuangan lainnya yang melibatkan pengelolaan aset dan dana masyarakat dalam jumlah besar (Rizki & Dewi, 2025; Sitorus & Prasetyo, 2024). Selain itu, PT Pegadaian punya jaringan operasional yang luas dengan ribuan outlet pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sehingga aktivitas pengawasan dan pengendalian menjadi semakin menantang (Fatmawati & Hidayah, 2024; Sitorus & Prasetyo, 2024).

Urgensi riset ini juga didukung oleh adanya beberapa kasus *fraud* yang terjadi pada unit operasional PT Pegadaian di berbagai daerah (Fatmawati & Hidayah, 2024). Beberapa kasus yang pernah terungkap antara lain dugaan penyimpangan penyaluran kredit pada unit bisnis mikro PT Pegadaian Cabang Rantepao, transaksi gadai fiktif pada PT Pegadaian UPC Legundi, serta pelanggaran prosedur operasional pada beberapa unit pelayanan lainnya yang mengakibatkan kerugian perusahaan dalam jumlah yang tidak sedikit (Fatmawati & Hidayah, 2024; Sitorus & Prasetyo, 2024). Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan jasa keuangan dengan jaringan operasional yang luas tetap menghadapi risiko *fraud* yang signifikan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengendalian dan tata kelola yang efektif (Lubis & Maisyarah, 2026; Ghozali et al., 2025; Gulo & Siregar, 2023).

Meskipun riset ini dilangsungkan pada PT Pegadaian Kantor Pusat, keberadaan kantor pusat punya peran strategis sebagai pusat pengambilan kebijakan, pengawasan, serta penyusunan sistem pengendalian yang diterapkan pada seluruh unit operasional perusahaan. Oleh sebab itu, efektivitas mekanisme seperti *whistleblowing system*, pengendalian internal, *good corporate governance*, dan komite audit pada tingkat kantor pusat menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pencegahan kecurangan laporan keuangan di seluruh lingkungan PT Pegadaian (Mandal & S., 2023; Pratiwi & Nugroho, 2025; Sudjono, 2023). Menurut Teori Agen, konflik kepentingan (*agency conflict*) dan asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal dapat menyebabkan *fraud* (Saikhu et al., 2025; Pratiwi & Nugroho, 2025; Fathoni et al., 2024).

Kondisi seperti ini dapat mendorong manajemen buat melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan, seperti mengubah laporan keuangan buat mencapai tujuan tertentu atau mendapatkan keuntungan pribadi (Rasyidah et al., 2024; Wang et al., 2024; Ghozali et al., 2025). Perusahaan harus menerapkan *whistleblowing system*, pengendalian internal, pemerintahan yang baik, dan komite audit buat mengurangi konflik keagenan (Mandal & S., 2023; Handoko & Amelia, 2021; Pratiwi & Nugroho,

2025; Fathoni et al., 2024). Sistem *whistleblowing* ialah salah satu cara penting buat mendeteksi dan mencegah penipuan sebab memberikan saluran pelaporan pelanggaran yang aman dan terpercaya bagi karyawan dan pihak eksternal (Mourer, 2026; Ramadhani & Trisnaningsih, 2023; Handoko & Amelia, 2021). Menurut Teori Perilaku Organisasi Prososial, pelaporan pelanggaran ialah jenis perilaku prososial yang dilangsungkan individu buat melindungi organisasi dari kerugian yang dapat disebabkan oleh tindakan tidak etis atau kecurangan (Ramadhani & Trisnaningsih, 2023; Mourer, 2026).

Selain itu, menurut *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas kebisaan buat melakukan tindakan tersebut memengaruhi keputusan individu buat melakukan *whistleblowing* (Ramadhani & Trisnaningsih, 2023; Mourer, 2026). Untuk menghindari penipuan keuangan, sistem whistleblowing dan pengendalian internal yang efektif sangat penting (Mandal & S., 2023; Maiviza & Kusumah, 2025; Maulidi et al., 2024). Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi peluang manipulasi dengan membagi fungsi, sistem otorisasi, pengawasan, dan pengawasan yang memadai (Hamilah et al., 2022; Budiman et al., 2022). Di sisi lain, diharapkan bahwa penerapan sistem manajemen perusahaan yang berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran akan meningkatkan kualitas pengawasan dan mengurangi kemungkinan kesalahan laporan keuangan (Handoko & Amelia, 2021; Tanjaya & Kwarto, 2022).

Tetapi temuan penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa temuan empiris tidak konsisten (Welly et al., 2024; Tanjaya & Kwarto, 2022). Studi memperlihatkan bahwa sistem *whistleblowing* membantu mencegah *fraud* (Sumanto & Zuhdi, 2026; Johan et al., 2022), tetapi penelitian lain memperlihatkan bahwa kinerja sistem sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, perlindungan terhadap pelapor, dan tingkat kepercayaan pegawai terhadap kerahasiaan identitas pelapor (Maiviza & Kusumah, 2025; Ayuni et al., 2024; Sari, 2024). Inkonsistensi juga ditemukan pada variabel *good corporate governance* dan pengendalian internal (Welly et al., 2024; Aryani & Fitri, 2023). Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa kedua mekanisme tersebut dapat mencegah *fraud* (Aryani & Fitri, 2023; Budiman et al., 2022; Maisaroh & Nurhidayati, 2021), tetapi penelitian lain menemukan bahwa kualitas implementasi dan komitmen manajemen sangat penting buat menjalankan kedua mekanisme tersebut (Mandal & S., 2023; Andeskara & Fachriyah, 2023; Maulidi et al., 2024).

Selain itu, komite audit telah ditunjukkan sebagai faktor independen dalam menggambarkan pencegahan *fraud* (Hamilah et al., 2022; Budiman et al., 2022). Tidak banyak penelitian yang memeriksa komite audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan kepemimpinan perusahaan yang baik buat mencegah penipuan keuangan. Ini terutama berlaku buat perusahaan besar di sektor jasa keuangan. Komite audit secara teoritis bertanggung jawab buat mengawasi proses pelaporan keuangan, kinerja pengendalian internal, dan penerapan tata kelola perusahaan. Oleh sebab itu, diharapkan keberadaannya dapat meningkatkan kinerja mekanisme pencegahan *fraud* perusahaan.

Berlandaskan uraian tersebut, riset ini bertujuan buat melihat bagaimana sistem *whistleblowing*, pengendalian internal, dan kepemimpinan perusahaan yang baik berdampak pada pencegahan kecurangan laporan keuangan di PT Pegadaian Kantor Pusat, dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Melalui pengetestan berbagai mekanisme tata kelola perusahaan buat mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi, yang merupakan penyebab utama *financial statement fraud*, riset ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori agensi. Selain itu, hasil riset ini diharapkan dapat membantu PT Pegadaian mengevaluasi sistem pelaporan pelanggaran, pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan fungsi pengawasan komite audit buat meningkatkan upaya mencegah laporan keuangan yang tidak akurat (Mandal & S., 2023; Maiviza & Kusumah, 2025).

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory as Grand Theory*)

Teori Agensi pertama kali muncul (Jensen & Meckling, 2019). Teori ini membahas hubungan antara principal, yang berfungsi sebagai pemilik perusahaan, dan agen, yang diberi wewenang buat mengelola perusahaan. Sebab masing-masing pihak punya tujuan yang berbeda, konflik kepentingan sering muncul dalam hubungan tersebut. Asimetri informasi terjadi sebab manajemen sebagai agen punya lebih banyak informasi daripada pemilik perusahaan, menurut Jensen dan Meckling, (2019). Kondisi seperti ini dapat mendorong perilaku yang tidak masuk akal, seperti mengubah laporan

keuangan atau penipuan buat kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan sistem pengawasan yang kuat buat mengurangi konflik kepentingan.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Artikel *The Theory of Planned Behavior* dikembangkan oleh Icek, (1991) yang mengarah pada penciptaan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut teori ini, niat (*behavioral intention*) memengaruhi perilaku seseorang. Ada tiga komponen utama niat ini: *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. *Attitude toward behavior* memperlihatkan bagaimana seseorang meskor suatu perilaku, apakah itu dianggap positif atau negatif. *Subjective norm* memperlihatkan tekanan sosial atau dukungan lingkungan terhadap perilaku tertentu, sedangkan *perceived behavioral control* memperlihatkan bagaimana seseorang meskor suatu perilaku.

TPB dilangsungkan dalam riset ini buat menjelaskan perilaku pegawai saat menggunakan sistem *whistleblowing*. Pegawai akan punya kecenderungan buat melaporkan pelanggaran apabila mereka memandang pelaporan sebagai tindakan yang benar, memperoleh dukungan dari lingkungan organisasi, serta merasa punya kebisaan dan perlindungan yang memadai dalam melakukan pelaporan.

Teori Perilaku Prososial Organisasi (*Prosocial Organizational Behavior Theory)*

Artikel *Prosocial Organizational Behaviors* ditulis oleh Brief dan Motowidlo (1986), yang pertama kali memperkenalkan Teori Perilaku Organisasi Sosial. Menurut teori ini, anggota organisasi dapat melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain dan organisasi secara keseluruhan. Perilaku tersebut dilangsungkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan organisasi, menjaga kepentingan organisasi, serta melindungi organisasi dari potensi kerugian.

Dalam riset ini, tindakan *whistleblowing* dipandang sebagai bentuk perilaku prososial sebab dilangsungkan buat melindungi organisasi dari kerugian akibat *fraud* dan menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya dipengaruhi oleh niat individu buat melaporkan pelanggaran sebagaimana dijelaskan oleh TPB, tetapi juga oleh motivasi prososial individu buat melindungi organisasi.

Fraud ialah tindakan yang dilangsungkan secara sengaja buat memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan atau manipulasi informasi yang tidak masuk akal. Menurut ACFE, *fraud* terdiri dari penyalahgunaan aset, korupsi, dan penipuan laporan keuangan. Riset ini fokus pada penipuan laporan keuangan, yaitu manipulasi atau penyampaian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya buat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Namun, pencegahan penipuan ialah seluruh sistem yang dimaksudkan buat mengurangi kemungkinan penipuan terjadi sebelum tindakan tersebut diambil.

Riset ini menggunakan *Agency Theory* sebagai teori utama buat menjelaskan terjadinya *financial statement fraud* akibat konflik kepentingan dan asimetri informasi. Sementara itu, *Theory of Planned Behavior* dan *Prosocial Organizational Behavior Theory* dilangsungkan buat menjelaskan perilaku individu dalam memanfaatkan *whistleblowing system* sebagai salah satu mekanisme pencegahan *fraud*. Dengan demikian, *Agency Theory* menjelaskan mengapa *fraud* dapat terjadi, sedangkan TPB dan POBT menjelaskan mengapa individu bersedia berpartisipasi dalam pencegahan *fraud* melalui pelaporan pelanggaran.

Whistleblowing System

Whistleblowing system (WBS) ialah sistem pelaporan pelanggaran yang diberikan oleh organisasi. Memungkinkan individu menyampaikan dugaan penyimpangan atau kecurangan secara aman, rahasia, dan terstruktur. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa sistem pelaporan pelanggaran harus terdiri dari beberapa komponen utama: mekanisme pelaporan, tindak lanjut laporan, perlindungan terhadap pelapor, penerapan reward dan sanksi, dan sosialisasi kebijakan kepada semua anggota organisasi.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, penelitian Dwianto et al., (2024) menyelidiki sistem *whistleblowing* dari sudut pandang perilaku. *Attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* ialah tiga indikator utama yang dilangsungkan dalam kerangka ini buat mengukur efektivitas *whistleblowing*. Sikap terhadap tindakan melapor memperlihatkan sejauh mana orang melihat *whistleblowing* sebagai hal yang baik dan berskor. Norma subjektif termasuk dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan, serta budaya organisasi yang mendorong laporan kesalahan. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan terkait dengan rasa aman dari ancaman pembalasan, kemudahan

menggunakan saluran pelaporan, dan pemahaman prosedur pelaporan. Metode ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem *whistleblowing* tidak hanya bergantung pada prosedur dan struktur formal, tetapi juga pada faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keinginan individu buat melaporkan.

Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) merumuskan pengendalian internal buat pertama kalinya. Dalam COSO *Internal Control Integrated Framework* tahun 1992, COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan seluruh staf organisasi, dan dimaksudkan buat memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi, termasuk efisiensi dan efektivitas operasional. Menurut Angraini et al. (2025), sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik tidak hanya dapat menemukan penyimpangan tetapi juga dapat mengurangi kemungkinan kecurangan melalui pengawasan dan pencegahan.

Good Corporate Governance

Pada dasarnya, *Good Corporate Governance* (GCG) ialah mekanisme buat mengarahkan dan mengawasi perusahaan melalui sistem aturan yang mengatur cara manajemen, pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa tujuan GCG ialah buat memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta punya kebisaan buat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan.

Regulasi nasional seperti Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002, yang menetapkan lima prinsip utama sebagai dasar tata kelola perusahaan, mendukung konsep dasar ini. Dengan demikian, indikator dan dimensi GCG termasuk transparansi, yang berarti bahwa perusahaan terbuka buat memberikan informasi yang relevan dan material kepada publik. Akuntabilitas, yang berarti bahwa setiap organ perusahaan tahu apa yang mereka lakukan, dan siapa yang bertanggung jawab atas apa.Tanggung jawab, yang berarti bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan mengikuti etika korporasi yang sehat. Independensi, yang berarti mengelola bisnis secara profesional tanpa gangguan atau konflik kepentingan, dan kewajaran, yang berarti keadilan perusahaan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai peraturan. Kelima prinsip ini berfungsi sebagai standar dan dasar buat membangun tata kelola yang kuat dan stabil dalam jangka panjang.

Relevansi prinsip-prinsip tersebut diperkuat oleh penelitian empiris terbaru yang memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi GCG sangat ditentukan oleh sejauh mana perusahaan membangun sistem pengawasan internal yang komprehensif. Penelitian Dina et al., (2025) menemukan bahwa GCG berdampak positif dan signifikan terhadap penguatan mekanisme internal, khususnya melalui efektivitas audit internal dan sistem *whistleblowing*. Namun, riset ini juga memperlihatkan bahwa GCG belum bisa secara langsung menekan kejadian *fraud* tanpa didukung oleh sistem kontrol yang memadai, mengingat *fraud* merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh kesempatan, rasionalisasi, dan tekanan dalam organisasi Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan GCG tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat pencegahan *fraud*, melainkan membutuhkan harmonisasi dengan perangkat pengendalian internal dan Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan yang berintegritas tinggi. Transparansi, misalnya, hanya akan efektif jika diiringi dengan sistem audit internal yang independen. Demikian pula, akuntabilitas akan menjadi sekadar formalitas jika tidak didukung oleh struktur pengawasan yang berfungsi secara efektif buat meskor kinerja manajerial.

Kecurangan (*Fraud*)

kecurangan laporan keuangan berangkat dari fondasi teoretis yang dijelaskan oleh peneliti terdahulu seperti Putri & Hendrawati, (2025) yang menegaskan bahwa kecurangan terjadi ketika informasi akuntansi disajikan secara tidak wajar dan menyesatkan pengguna laporan keuangan, serta Farochi & Nugroho, (2022) yang menekankan bahwa *fraud* muncul sebab lemahnya struktur pengendalian internal yang memberi peluang manipulasi angka akuntansi . Peneliti terdahulu ini memberikan dasar bahwa kecurangan tidak terjadi secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh struktur organisasi dan perilaku individu. Pada tahap ini, indikator kecurangan laporan keuangan dapat dipahami melalui tiga aspek utama.

Tekanan, seperti tekanan buat mencapai target keuangan tertentu. Selanjutnya Kesempatan, berupa kelemahan pengendalian internal dan tingginya akses individu buat mengubah data dan Rasionalisasi, yakni pembenaran moral atas tindakan manipulatif. Ketiga indikator tersebut menjadi prinsip awal yang menjelaskan mengapa kecurangan laporan keuangan dapat muncul dalam suatu organisasi dan dilangsungkan sebagai pijakan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Adapun perkembangan berikutnya, penelitian terdahulu seperti Aghnia, (2021) memperlihatkan bahwa *fraud*, termasuk kecurangan laporan keuangan, dipengaruhi oleh faktor perilaku individu serta dinamika organisasi yang tidak sehat, sementara Nugroho & Afifi, (2022) menegaskan bahwa rendahnya etika organisasi dapat memperbesar peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan ketika struktur tata kelola tidak berjalan dengan baik.

Komite Audit

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015, komite audit ialah lembaga pengawasan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris buat memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, bahwa struktur pengendalian internal berjalan dengan baik, dan bahwa prosedur audit internal dan eksternal dilaksanakan dengan benar. Definisi normatif ini menjadi pijakan penting bagi berbagai penelitian modern dan berfungsi memberikan landasan bahwa komite audit merupakan mekanisme tata kelola yang menjaga kualitas serta integritas laporan keuangan perusahaan. Penelitian terbaru oleh Safitri & Rani, (2022) memperlihatkan bahwa meskipun komite audit punya tugas inti dalam pengawasan laporan keuangan, tidak selalu ditemukan pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sebab efektivitasnya bergantung pada kualitas pelaksanaan audit, independensi, serta sistem *whistleblowing* perusahaan

Sementara itu, penelitian lain dalam jurnal Putri & Hendrawati, (2025) menegaskan bahwa komite audit berperan penting dalam mencegah kecurangan dan menjaga akurasi penyajian informasi keuangan sebab kompetensi anggotanya memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengendalian internal serta risiko penyimpangan dalam laporan keuangan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Dalam perspektif *Agency Theory*, *whistleblowing* dipandang sebagai mekanisme yang membantu mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Ketika organisasi punya saluran pelaporan yang bekerja dengan baik, penyimpangan manajerial dapat lebih cepat diketahui oleh pihak yang punya wewenang pengawasan, sehingga risiko moral hazard dalam laporan keuangan dapat ditekan (Jensen & Meckling, 2019). Selain itu, *Prosocial Organizational Behavior Theory* menjelaskan bahwa pelaporan pelanggaran merupakan tindakan prososial yang dilangsungkan individu demi kepentingan organisasi, meskipun terdapat risiko personal. Keberadaan perlindungan hukum dan organisasi membuat pelapor punya keberanian moral yang lebih besar buat mengungkap kecurangan (Near & Miceli, 1992). Sejumlah penelitian mendukung hubungan ini. Suasri, (2025) memperlihatkan bahwa *whistleblowing* system secara signifikan memperkuat pencegahan *fraud* melalui peningkatan deteksi dini dan pengurangan peluang manipulasi. Rizqa, (2019) menambahkan bahwa sistem pelaporan yang terstruktur bisa mempersempit ruang gerak pelaku dengan meningkatkan tekanan pengawasan dan transparansi. Penelitian (Destiyana et al., 2024; Santi & Wafa, 2024; Shonhadji & Maulidi, 2021) juga menegaskan bahwa perlindungan pelapor berperan penting dalam mendorong individu buat melaporkan pelanggaran keuangan. Dengan demikian, keberadaan *whistleblowing system* merupakan elemen penting dalam meningkatkan kebisaan organisasi mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan.

H1: *Whistleblowing system* berdampak positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Dalam perspektif *Agency Theory*, pengendalian internal merupakan alat monitoring formal yang memperkuat kebisaan prinsipal dalam mengawasi agen, sehingga risiko moral hazard dalam laporan keuangan dapat diminimalkan. Pengendalian internal tidak hanya mengawasi output, tetapi juga mengendalikan alur proses pelaporan, sehingga menciptakan sistem pertanggungjawaban yang lebih solid. Hasil dari para peneliti mendukung peran strategis pengendalian internal dalam mencegah *fraud*. Ramlah et al., (2023) menemukan bahwa pengendalian internal berdampak signifikan dalam

mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan. Destiyana et al., (2024) juga melaporkan bahwa efektivitas pengendalian internal bisa mengurangi risiko sistemik terjadinya *fraud* dengan meningkatkan kesiapan organisasi dalam mendeteksi anomali dan kesalahan sejak awal. Nugroho & Afifi, (2022), Suasri, (2025) dan Utama & Astawa, (2021) juga memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa organisasi yang punya kontrol internal memadai lebih bisa menjaga keandalan proses pelaporan dan mencegah penyimpangan, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan demikian, pengendalian internal menjadi elemen penting dalam membangun sistem pelaporan yang kokoh dan bebas kecurangan.

H2: Pengendalian internal berdampak positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*

Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud

Dalam teori agen, tata kelola perusahaan yang baik ialah alat tata kelola organisasi yang dimaksudkan buat mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. GCG meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan memastikan bahwa bisnis dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil (OECD, 2015). Penerapan prinsip-prinsip GCG terbukti mendorong organisasi buat menjunjung tinggi etika kerja, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menumbuhkan budaya organisasi yang antikorupsi. Beberapa studi terdahulu memperlihatkan hubungan positif antara GCG dan pencegahan kecurangan. Penelitian Pramesti et al., (2025), Destiyana et al., (2024), Lindasari, (2025) dan Saputra et al., (2025) menyatakan bahwa GCG berdampak signifikan dalam mengurangi praktik kecurangan. Begitu juga hasil penelitian dari Nugroho & Afifi, (2022) yang memperkuat bahwa GCG ialah elemen penting dalam menciptakan integritas dan pengawasan efektif dalam organisasi.

H3: GCG berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud*

Pengaruh Komite Audit Terhadap Pencegahan *Fraud*

Komite audit merupakan organ independen dalam tata kelola yang bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, meskor efektivitas pengendalian internal, dan merekomendasikan perbaikan atas temuan audit. Dalam perspektif *Agency Theory*, keberadaan dan kualitas komite audit meningkatkan kapabilitas prinsipal buat mengawasi agen, sehingga risiko perilaku oportunistik seperti manipulasi laporan dapat ditekan. Beberapa penelitian seperti Maisaroh & Nurhidayati, (2021), Masthura et al., (2025), Indarti et al., (2024) dan Imam Kampono & Nur, (2025) memberikan bukti bahwa komite audit yang efektif ditandai oleh independensi, kompetensi anggota, dan frekuensi rapat yang memadai berkaitan dengan penurunan insiden kecurangan pelaporan. Menurut Indarti et al., (2024) komite audit berdampak penuh terhadap pencegahan *fraud*.

H4: Komite audit berdampak positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*

Komite Audit Memoderasi Pengaruh *Whistlebblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan

Komite audit berperan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa laporan tidak hanya diterima, tetapi juga dianalisis secara serius, diinvestigasi, dan menghasilkan keputusan perbaikan yang mengikat. Dalam hal ini, komite audit memperkuat kredibilitas *whistleblowing system* sebab ia menjadi penerjemah informasi pelanggaran menjadi tindakan nyata dalam pengawasan internal. Berlandaskan *Agency Theory*, komite audit meningkatkan efektivitas monitoring sehingga tekanan pada agen buat bertindak sesuai kepentingan perusahaan semakin besar. Para peneliti mendukung yang peran moderasi ini Santi & Wafa, (2024), Puspita, (2021) serta Safitri & Rani, (2022) membuktikan bahwa komite audit meningkatkan efektivitas *whistleblowing* dalam menekan tindakan kecurangan sebab laporan lebih mungkin ditindaklanjuti secara independen. (Dina et al., 2025) menemukan bahwa kualitas tindak lanjut atas laporan pelanggaran meningkat signifikan ketika komite audit terlibat langsung dalam proses peskoran. Selain itu, Maisaroh & Nurhidayati, (2021) menegaskan bahwa perusahaan dengan komite audit aktif punya hubungan yang lebih kuat antara *whistleblowing* dan kebisaan mencegah *fraud*.

H5: Komite audit memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan

Komite Audit Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Dari perspektif COSO, (2013) komite audit memperkuat komponen "*monitoring activities*" sebagai elemen inti dari sistem pengendalian internal. Ketika komite audit memantau pelaksanaan kontrol secara berkelanjutan, perusahaan menjadi lebih siap mendeteksi gejala *fraud* sejak tahap awal. Dalam

kerangka *Agency Theory*, komite audit juga meningkatkan tekanan monitoring terhadap agen sehingga kesempatan buat memanipulasi pelaporan menjadi jauh lebih kecil. Bukti empiris memperkuat posisi ini. Nugroho & Afifi, (2022) menemukan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* lebih kuat pada perusahaan yang punya komite audit aktif. Penelitian oleh Putri & Hendrawati, (2025) dan Indarti et al., (2024) memperlihatkan bahwa komite audit meningkatkan konsistensi implementasi kontrol internal, terutama dalam proses dokumentasi dan verifikasi transaksi. Sementara itu, Maisaroh & Nurhidayati, (2021) membuktikan bahwa organisasi dengan komite audit kompeten punya tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam menindaklanjuti kelemahan kontrol yang ditemukan dalam audit internal. Konsistensi hasil riset ini memperlihatkan bahwa komite audit memperkuat hubungan positif antara pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.

H6: komite audit memperkuat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan

Komite Audit Memoderasi Pengaruh GCG Terhadap Pencegahan *Fraud*

Komite audit berperan memastikan bahwa mekanisme pelaporan keuangan, proses audit, dan implementasi kebijakan kontrol berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat. Dalam *Agency Theory*, komite audit memperkuat posisi pemilik dalam mengevaluasi tingkah laku agen sehingga potensi moral hazard dapat ditekan secara signifikan.

Utama & Astawa, (2021) dan Maisaroh & Nurhidayati, (2021) dan Sunantar et al., (2025) menemukan bahwa GCG punya dampak pencegahan *fraud* yang lebih besar pada organisasi dengan komite audit yang menjalankan fungsinya secara aktif. Menurut Santi & Wafa, (2024) serta Farochi & Nugroho, (2022) juga membuktikan bahwa tata kelola perusahaan menghasilkan peningkatan signifikan dalam disiplin kontrol internal serta penurunan peluang manipulasi keuangan. Dengan demikian, komite audit berperan sebagai pemoderasi kunci yang memperkuat efektivitas GCG dalam mencegah *fraud*.

H7: Komite audit memperkuat pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan desain survei kuantitatif, riset ini bertujuan buat mengevaluasi hubungan kausal antara variabel-variabel dan mengukur dampak langsung dan tidak langsung antara *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *governance* perusahaan yang baik terhadap pencegahan kecurangan *fraud*. Komite audit berfungsi sebagai variabel moderasi. Data yang dilangsungkan dalam riset ini berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada karyawan di fungsi keuangan PT. Pegadaian (Persero) yang meliputi akuntansi dan pelaporan, audit internal, budgeting, treasury, kontrol internal, komite audit, dan manajemen perusahaan.

Kuesioner ini dikirim baik secara fisik maupun digital melalui formulir *Google Drive*. Berlokasi di Jl. Kramat Raya No.162, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Menara Gade terletak di sana.Fokus utama riset ini yaitu "Penelitian dilangsungkan pada PT. Pegadaian (Persero), di Jakarta yang punya unit audit internal dan menerapkan *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal secara formal." Penelitian dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 minggu terhitung dari bulan desember 2025, tergantung pada proses pengumpulan data dan analisis yang dilangsungkan.

Rumus *Lameshow* dipilih sebagai sampel riset ini. Teori sampling terbagi menjadi dua kategori: probabilitas sampling dan nonprobability sampling. Riset ini menggunakan nonprobability sampling. Menurut Septiani et al., (2020) sampel non-probabilitas ialah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi punya peluang yang berbeda buat diambil sebagai sampel. Dalam riset ini, peneliti menggunakan teknik *convenience sampling*. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemudahan buat memperoleh data dari responden yang mudah diakses serta bersedia memberikan partisipasi. Jenis sampel ini umumnya lebih sesuai dilangsungkan pada penelitian penjajakan, yang nantinya dapat dilanjutkan dengan penelitian berikutnya menggunakan sampel acak (*random sampling*) buat memperoleh hasil yang lebih representative (Darwin, et al., 2021) Populasi dalam riset ini ialah pegawai PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat yang punya keterlibatan atau pemahaman terhadap implementasi *whistleblowing system*, pengendalian internal, *good corporate governance*, komite audit, serta proses

pelaporan keuangan perusahaan. Namun demikian, jumlah populasi yang memenuhi karakteristik tersebut tidak dapat diketahui secara pasti sebab keterbatasan akses peneliti terhadap data pegawai yang secara langsung terlibat dalam fungsi pengendalian, tata kelola, audit, dan pelaporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, rumus *Lemeshow* biasanya dilangsungkan buat menentukan ukuran sampel buat penelitian dengan populasi yang tidak diketahui (populasi yang tidak diketahui). Ini dipilih sebab metode ini memungkinkan peneliti buat menentukan jumlah sampel minimum yang representatif dalam kasus di mana ukuran populasi tidak diketahui secara pasti. Selain itu, rumus *Lemeshow* banyak dilangsungkan dalam penelitian survei kuantitatif yang menggunakan teknik non-probabilistik.

Dengan tingkat kepercayaan sejumlah 95%, skor Z sejumlah 1,96, proporsi populasi sejumlah 0,5, dan tingkat kesalahan (margin of error) sejumlah 10%, metode yang dilangsungkan buat menentukan ukuran sampel dianggap sebagai yang paling konservatif sebab tidak ada informasi tentang proporsi populasi yang sebenarnya. Berlandaskan perhitungan yang dilangsungkan menggunakan rumus *Lemeshow*, jumlah sampel minimum ialah 96,04 orang, yang kemudian dibulatkan menjadi 97 orang.

Teknik pengambilan sampel yang dilangsungkan dalam riset ini ialah non-probability sampling dengan pendekatan *convenience sampling*, yaitu teknik pemilihan responden berlandaskan kemudahan akses peneliti terhadap responden yang memenuhi kriteria penelitian. Pemilihan teknik ini didasarkan pada keterbatasan akses peneliti terhadap keseluruhan populasi serta keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian. Meskipun demikian, penggunaan *convenience* sampling punya keterbatasan dalam hal generalisasi hasil penelitian sehingga temuan riset ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan lebih merepresentasikan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian dibandingkan seluruh populasi pegawai PT Pegadaian (Persero). Unit analisis dalam riset ini ialah individu pegawai PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat. Adapun responden penelitian ditetapkan berlandaskan beberapa kriteria, yaitu: merupakan pegawai PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat, punya masa kerja minimal satu tahun dan punya pemahaman atau keterlibatan dalam penerapan *whistleblowing system*, pengendalian internal, *good corporate governance*, komite audit, maupun proses pelaporan keuangan perusahaan.

Sebanyak 100 kuesioner disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian buat mendapatkan informasi yang diperlukan. Metode pengumpulan data ini dilangsungkan melalui penyebaran kuesioner secara online melalui *Google Forms*, yang memungkinkan responden buat lebih fleksibel dalam proses pengisian dan meminimalkan waktu dan jarak yang dibutuhkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 kuesioner dikembalikan dan dinyatakan layak buat diolah, sehingga tingkat pengembalian kuesioner (respons rate) penelitian mencapai 97%. Skala Likert dilangsungkan buat mengukur semua variabel penelitian, dengan skor mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 4 (sangat setuju). Skala ini dipilih sebab bisa mengukur secara sistematis persepsi dan peskoran responden terhadap indikator penelitian.

Table 1. Tabel Operasional

VARIABEL	PENELITI	DIMENSI	INDIKATOR	KODE ITEM	SKALA LIKERT
	Variabel Independen				
X1– *Whistleblowing System*	Near & Miceli (1985); Mulyawati (2025); Santi & Wafa, (2024); Rafada & Rifqi (2025);	Mekanisme Pelaporan	1. Ketersediaan saluran pelaporan ketersediaan berbagai media pelaporan yang mudah diakses	WBS. 1.1	1-4
		Prosedur Pelaporan	2. Kejelasan alur pelaporan prosedur pelaporan yang runtut dan mudah dipahami	WBS.2.1	1-4

	POJK 55/2015	Perlindungan Pelapor	3.	Kerahasiaan & anti-retaliasi. perlindungan identitas pelapor dari risiko pembalasan	WBS.3.1	1-4
		Tindak Lanjut -	4.	Verifikasi & investigasi proses menindaklanjuti laporan secara objektif	WBS. 4.1	1-4
		Budaya Etika	5.	Norma pelaporan budaya etis yang mendukung keberanian melapor	WBS.5.1	1-4
X2-Pengendalian Internal	COSO, (2013); Saida et al., (2023); Adawiyah et al., (2023); Dwianto et al., (2024);	Lingkungan Pengendalian	1.	Integritas & komitmen memperlihatkan komitmen pimpinan dan pegawai buat menjaga perilaku etis serta budaya organisasi yang kuat Pengendalian internal mengharuskan Komitmen manajemen puncak dalam menciptakan budaya anti-f*raud*	PI. 1.1	1-4
		Peskoran Risiko	2.	Identifikasi risiko proses mengenali potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi	PI.2.1	1-4
		Aktivitas Pengendalian	3.	Pemisahan tugas pembagian wewenang agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kesalahan dalam proses kerja	PI.3.1	1-4
		Informasi & Komunikasi	4.	Ketersediaan informasi kejelasan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan	PI.4.1	1-4

		Pemantauan	5.	Audit internal kegiatan pengawasan berkala buat memastikan sistem berjalan efektif	PI.5.1	1-4
X3 – Tata kelola perusahaan yang baik	Saputra & Rosharlianti, (2025);Dina et al., (2025); Saputra & Rosharlianti, (2025); Nugroho & Afifi, 2022);	Transparansi	1.	Keterbukaan informasi penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan	TKPB.1.1	1-4
		Akuntabilitas	2.	Struktur tanggung jawab kejelasan tugas dan pertanggungjawaban tiap fungsi dalam organisasi	TKPB.2.1	1-4
		Responsibilitas	3.	Kepatuhan regulasi tingkat kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan standar yang berlaku	TKPB 3.1	1-4
		Independensi	4.	Bebas konflik kebisaan pengelola organisasi buat bertindak objektif tanpa pengaruh pihak tertentu	TKPB 4.1	1-4
		Fairness	5.	Perlakuan adil pemberian hak dan perlakuan setara bagi seluruh pemangku kepentingan	TKPB 5.1	1-4
Variabel Dependen						
Y– Pencegahan kecurangan laporan keuangan	Dwianto et al., (2024); Adawiyah et al., (2023); Saida et al., 2023); Riane & Mutmainah, (2025); (Mulyawati, 2025)	Tekanan	1.	Target kinerja tekanan yang diterima pegawai buat memenuhi target yang dapat mendorong terjadinya kecurangan	PKLK 1.1	1-4
		Kesempatan	2.	Kelemahan control adanya celah dalam pengendalian internal yang	PKLK 2.1	1-4

					memungkinkan kecurangan terjadi	
			Rasionalisasi	3.	Pembenaran alasan yang dibuat pelaku buat membenarkan tindakan kecurangan	PKLK 3.1	1-4
			Kualitas Pelaporan	4.	Konsistensi data tingkat keandalan dan kesesuaian data dalam laporan keuangan	PKLK 4.1	1-4
			Manipulasi	5.	Perubahan angka laporan. perubahan disengaja pada angka laporan buat menutupi kondisi sebenarnya	PKLK 5.1	1-4
Z-audit	Komite	POJK 55/2015; Imam Kampono & Nur, (2025); Maulana & Samryn, (2025); Santi & Wafa, (2024); Riyanti, (2024)	Struktur Komite	1.	Jumlah anggota. penjelasan: komposisi anggota yang mempengaruhi efektivitas pengawasan	KA 1.1	1-4
			Kompetensi Teknis	2.	Keahlian akuntansi penjelasan: tingkat pemahaman teknis anggota dalam bidang akuntansi dan keuangan	KA. 2.1	1-4
			Independensi	3.	Proporsi independen penjelasan**:** persentase anggota yang tidak punya kepentingan pribadi terhadap manajemen	KA. 3.1	1-4
			Aktivitas Pengawasan	4.	Frekuensi rapat. penjelasan: intensitas pertemuan buat membahas isu pengawasan dan tindak lanjut	KA 4,1	1-4
			Efektivitas komunikasi & Pelaporan	5.	Penyampaian laporan komite audit secara berkala kepada dewan komisaris Kejelasan pelaporan isu risiko	KA 5.1	1-4

	& potensi *fraud*	
	Ketersediaan komunikasi terbuka dengan auditor internal/ekstern	

HASIL

Karakteristik Responden Berlandaskan jabatan

Data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden dengan jabatan auditor sebanyak 28 orang (28,87%), staff sebanyak 59 orang (60,82%), supervisor sebanyak 2 orang (2,06%), Manager sebanyak 3 orang (3,09%), dan Komite Audit 5 orang (5,15%).

Table 2. Karakteristik Responden Berlandaskan Jabatan

Posisi Jabatan	Jumlah	Presentase
Manager	3	3,09%
Supervisor	2	2,06%
Auditor	28	28,87%
Staff	59	60,82%
Komite Audit	5	5,15%

Sumber : Data Diolah, 2026

Karakteristik Responden Berlandaskan Lama Bekerja

Menurut data, 11 responden (11,34%) punya masa kerja kurang dari 1 tahun, 17 responden (17,53%), 27 responden (27,84%), dan 42 responden (4,33%) punya masa kerja lebih dari 5 tahun.

Table 3. Karakteristik Responden Berlandaskan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
> 1 Tahun	**11**	**11,34%**
1 – 3 Tahun	**17**	**17,53%**
3 – 5 Tahun	**27**	**27,84%**
>5 Tahun	**42**	**43,30%**

Sumber: Data Diolah, 2026

Analisis Measurement (*Outer Loading*)

Uji Validitas

Convergent Validity

Skor *convergen validity* ialah skor loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. *convergen validity* diskor berlandaskan korelasi antara item score/compound score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran indikator dapat dibuktikan valid jika *outer loading* > 0,7. Selain itu skor convergent validity juga dapat diukur dengan *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dalam model. Jika AVE > 0.7 maka dianggap valid.

Table 4. Hasil Uji *Outer Loading*

Indikator	Variabel	Outer Loading
X1.1	WBS	0.856
X1.2	WBS	0.869
X1.3	WBS	0.893
X1.4	WBS	0.908
X1.5	WBS	0.893
X2.1	PI	0.885
X2.2	PI	0.896

X2.3	PI	0.896
X2.4	PI	0.909
X2.5	PI	0.914
X3.1	GCG	0.922
X3.2	GCG	0.936
X3.3	GCG	0.936
X3.4	GCG	0.926
X3.5	GCG	0.898
Y.1	PFLK	0.902
Y.2	PFLK	0.913
Y.3	PFLK	0.914
Y.4	PFLK	0.910
Y.5	PFLK	0.905
Z.1	KA	0.891
Z.2	KA	0.890
Z.3	KA	0.920
Z.4	KA	0.902
Z.5	KA	0.913

Sumber : Data Diolah Oleh Smart PLS, 2026

Pengetestan validitas konvergen dilangsungkan dengan melihat skor outer loading setiap indikator terhadap konstruknya masing-masing. Menurut Hair et al. (2022), indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila punya skor outer loading di atas 0,70. Hasil pengetestan memperlihatkan bahwa seluruh indikator pada variabel *whistleblowing system*, pengendalian internal, *good corporate governance*, komite audit, dan pencegahan kecurangan laporan keuangan punya skor outer loading lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dan bisa merepresentasikan konstruk yang diukur.

Selain itu, pengetestan convergent validity juga dilangsungkan melalui skor *Average Variance Extracted* (AVE). Seluruh variabel penelitian punya skor AVE di atas 0,7 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen dan memperlihatkan bahwa masing-masing konstruk bisa menjelaskan lebih dari 70% varians indikatornya.

Berlandaskan hasil pengetestan *convergent validity*, seluruh indikator punya skor outer loading di atas 0,70 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen dan dinyatakan bisa merefleksikan konstruk yang diukur.

Average Variance Extracted (AVE)

Uji *Average Variance Extracted* (AVE) dilangsungkan buat meskor validitas konvergen pada model pengukuran, terutama dalam analisis SEM berbasis PLS. AVE sejumlah lebih dari 0,7 memperlihatkan bahwa konstruk laten dapat menjelaskan lebih dari 70% varians indikator dibandingkan dengan kesalahan pengukuran, sehingga indikator tersebar. Oleh sebab itu, pengetestan AVE ialah langkah penting buat memastikan bahwa indikator benar-benar mewakili struktur yang diteliti dan bahwa model penelitian punya kualitas pengukuran yang baik dan dapat dipercaya. Skor AVE buat studi ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

Table 5. Hasil Uji *Average Variance Exctracted* (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Pencegahan Keecurangan Laporan Keuangan (Y)	0,781
Whistleblowing System (X1)	0,810
Pengendalian Internal (X2)	0,853
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (X3)	0,826
Komite Audit (Z)	0,816

Sumber: Data Diolah, 2026

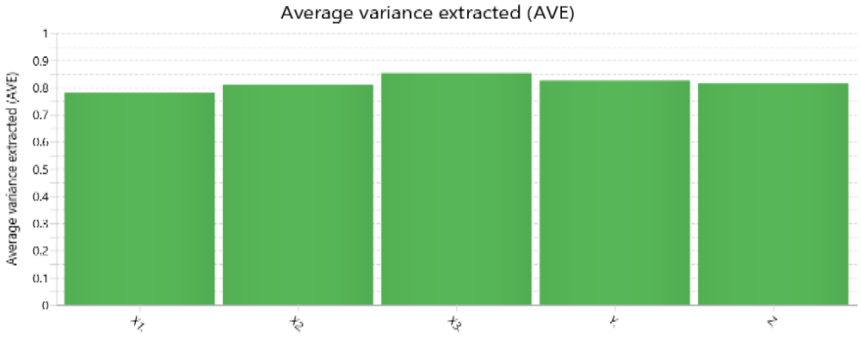

Gambar 1. Grafik AVE
Sumber : Data Diolah Smart PLS, 2026

Tabel dan grafik tersebut menampilkan skor *Average Variance Extracted* (AVE) sebagai metode tambahan dalam pengetestan validitas. Berlandaskan hasil yang disajikan, seluruh variabel yang meliputi *Whistleblowing System*, Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, Komite Audit, dan Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan, punya skor AVE di atas 0,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing indikator pada setiap variabel telah memenuhi kriteria yang baik, sehingga instrumen atau metode pengukuran yang dilangsungkan dinyatakan layak buat mengukur variabel-variabel tersebut.

Discriminant Validity

Salah satu cara buat menguji validitas diskriminan ialah dengan melihat skor *cross loading* faktor. *Skor cross loading* pada konstruk yang dituju harus lebih besar daripada skor cross loading pada konstruk lain, atau jika skor cross loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar daripada skor cross loading pada konstruk yang lain.

Table 6. Hasil Uji *Cross Loading*

Indikator	X1	X2	X3	Y	Z
X1.1	0.856	0.174	0.096	0.634	0.013
X1.2	0.869	0.186	0.033	0.671	0.151
X1.3	0.893	0.259	0.040	0.717	0.060
X1.4	0.908	0.158	0.140	0.728	0.103
X1.5	0.893	0.144	0.104	0.713	0.051
X2.1	0.167	0.885	0.253	0.263	0.081
X2.2	0.093	0.896	0.249	0.245	0.190
X2.3	0.191	0.896	0.307	0.348	0.214
X2.4	0.179	0.909	0.359	0.318	0.227
X2.5	0.272	0.914	0.266	0.372	0.125
X3.1	0.084	0.242	0.922	0.254	0.012
X3.2	0.107	0.312	0.936	0.215	0.004
X3.3	0.121	0.352	0.936	0.279	-0.009
X3.4	0.078	0.253	0.926	0.181	-0.052
X3.5	0.031	0.312	0.898	0.215	0.060
Y.1	0.697	0.297	0.208	0.902	0.085
Y.2	0.670	0.320	0.244	0.913	0.212
Y.3	0.684	0.361	0.289	0.914	0.196
Y.4	0.764	0.325	0.219	0.910	0.183
Y.5	0.747	0.293	0.191	0.905	0.084
Z.1	0.080	0.174	-0.001	0.148	0.891
Z.2	0.070	0.184	-0.049	0.117	0.890
Z.3	0.089	0.148	-0.028	0.158	0.920
Z.4	0.086	0.142	-0.032	0.089	0.902
Z.5	0.069	0.187	0.082	0.198	0.913

Sumber : Data Diolah Oleh Smart PLS, 2026

Composite Reability

Uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika punya skor composite reliability di atas 0,70 dan *Cronbach's Alpha* di atas 0,70.

Table 7. Hasil *Cronbach's Alpha & Composite Reability*

	Cronbach's Alpha	**Reliabilitas Komposit**		**Keterangan**
Whistleblowing System	0,930	0,947	0,7	Reliabel
Pengendalian Internal	0,942	0,955	0,7	Reliabel
GCG	0,957	0,967	0,7	Reliabel
Pencegahan *fraud*	0,947	0,960	0,7	Reliabel
Komite Audit	0.945	0,957	0,7	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2026

Berlandaskan tabel diatas semua variabel punya skor *cronbach's alpha* dan *composite reability* >0,7 yang artinya semua variabel reliabel atau dapat diandalkan.

R *Square* (R2)

Table 8. Hasil R Square (R2)

Variabel	***R Square***	***Adjusted R Square***
Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan	**0,724**	**0,702**

Sumber: Data Diolah, 2026

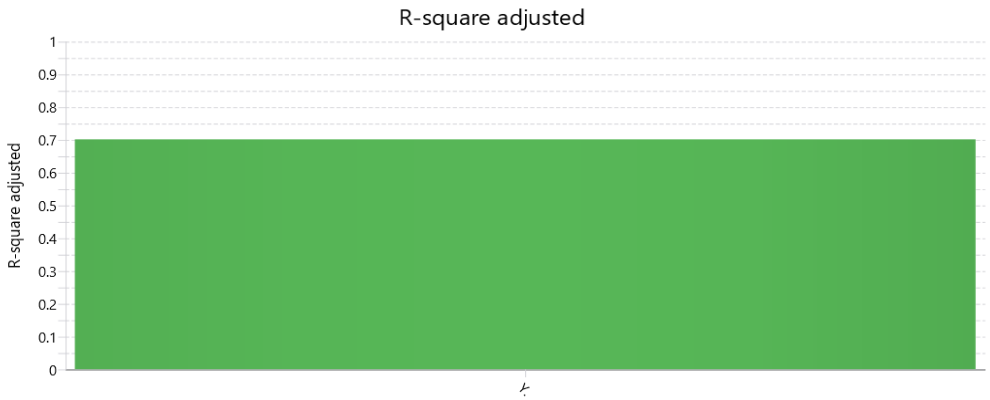

Gambar 2. Grafik R Square (R2)
Sumber : Data diolah oleh smart PLS, 2026

Buat mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam riset ini, hasil skor R Square ditunjukkan pada Tabel. memperlihatkan skor *R Square adjusted* yang dilangsungkan buat meskor pengaruh variabel independen terhadap varaibel dependen dalam riset ini. Skor *R Square adjusted* sejumlah 0,702 mengindikasikan bahwa 70% variabel pencegahan kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan secara stimultant oleh variabel *Whistleblowing System*, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan sisanya sejumlah 30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam riset ini.

Path Coeffeciemt

Table 9. **Hasil *Path Coeffcient***

Variabel	Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan
Whistleblowing System	0,741
Pengendalian Internal	0,120
GCG	0,145
Komite Audit	0,065
Komite Audit X *Whistleblowing System*	0,083
Komite Audit X Pengendalian Internal	-0,185
Komite Audit X GCG	-0,033

Sumber: Data Diolah, 2026

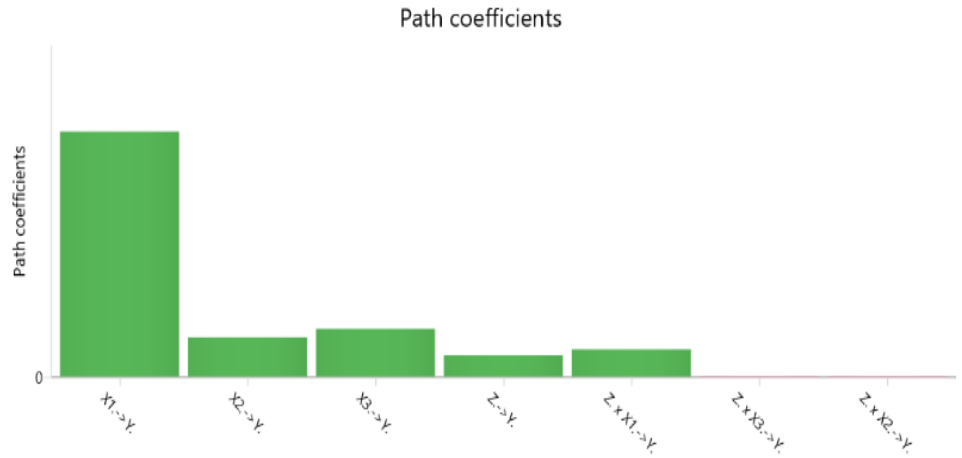

Gambar 3. Grafik *Path Coefficients*
Sumber : Data diolah Smart PLS, 2026

Tabel dan grafik di atas memperlihatkan hasil *Path Coeffcient* antara variabel Pencegahan Faud Laporan Keuangan dengan variabel *Whistleblowing System* sejumlah 0,741 dapat dilihat berdampak positif, variabel pengendalian internal dengan variabel Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan sejumlah 0,120 dapat dilihat berdampak positif namun masih lemah, dan tata kelola perusahaan yang baik dengan variabel Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan sejumlah 0,145 dapat dilihat berdampak positif namun masih lemah. Variabel komite audit terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan 0,065 dapat dilihat berdampak positif namun lemah, variabel komite audit memoderasi *Whistleblowing System* dengan Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan sejumlah 0,083 dapat dilihat berdampak positif namun lemah, variabel komite audit memoderasi pengendalian internal dengan Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan sejumlah -0,033 dapat dilihat berdampak negatif dan lemah, dan terakhir komite audit memoderasi GCG dengan Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan sejumlah -0,185 dapat dilihat berdampak negatif dengan tingkat mendekati sedang.

Table 10 Uji Hipotesis

	Original sample (O)	***Sample mean (M)***	***Standard deviation (STDEV)***	***T statistics (|O/STDEV|)***	***P values***
***Whistleblowing System* (X1) -> Pencegahan *Fraud* (Y)**	0.741	0.733	0.072	10.259	0.000
Pengendalian internal (X2) -> Pencegahan *Fraud*(Y)	0.120	0.123	0.073	1.644	0.100
GCG (X3) -> Pencegahan *Fraud* (Y)	0.145	0.142	0.066	2.188	0.029

Komite Audit (Z) -> Pencegahan *Fraud* (Y)	0.065	0.060	0.074	0.885	0.376
Komite Audit (Z) x *Whistleblowing System* (X1) -> Pencegahan *Fraud*(Y)	0.083	0.081	0.078	1.067	0.286
Komite Audit (Z) x pengendalian internal (X2) -> Pencegahan *Fraud* (Y)	-0.185	-0.180	0.084	2.191	0.028
Komite Audit (Z) x GCG (X3) ->Pencegahan *Fraud* (Y)	-0.033	-0.025	0.071	0.467	0.641

Sumber: Data Diolah, 2026

PEMBAHASAN

Whstleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem *whistleblowing* sangat membantu mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasilnya memperlihatkan bahwa semakin baik sistem pelaporan pelanggaran yang dilangsungkan oleh sebuah organisasi, semakin besar kemungkinan organisasi buat menemukan dan mencegah penipuan sejak awal. Saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses memungkinkan pekerja melaporkan dugaan penyimpangan tanpa khawatir akan tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan.

Menurut Teori Agensi oleh Jensen dan Meckling (2019), sistem *whistleblowing* dapat membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Ini sebab pengawas dapat memperoleh informasi tentang tindakan oportunistik lebih cepat. Dengan demikian, kemungkinan laporan keuangan yang dimanipulasi berkurang.

Hasil riset ini memberi tahu PT Pegadaian bahwa mereka harus terus meningkatkan kinerja sistem *whistleblowing* dengan melindungi pelapor lebih baik, menyederhanakan proses pelaporan, dan memastikan bahwa setiap laporan mendapatkan tindak lanjut yang jelas dan akuntabel. Selain itu, penting bagi pegawai buat dididik secara berkelanjutan tentang pentingnya budaya pelaporan pelanggaran agar mereka punya keberanian buat melaporkan kemungkinan kecurangan.

Studi sebelumnya (Destiyana et al., 2024; Rizqa, 2019; Putri & Hendrawati, 2025; Syafitri, 2023; dan Suasri, 2025) menemukan bahwa sistem whistleblowing membantu mencegah kecurangan sebab mereka dapat meningkatkan deteksi dini dan mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Studi Santi & Wafa, (2024) memperlihatkan bahwa perlindungan pelapor merupakan komponen penting dalam keberhasilan sistem whistleblowing.

Namun, temuan riset ini berbeda dengan penelitian lain (Rohmatin et al., 2021; Lindasari, 2025) yang menemukan bahwa sistem *whistleblowing* tidak punya dampak yang signifikan terhadap pencegahan penipuan. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh kepercayaan pegawai yang rendah terhadap kerahasiaan identitas pelapor dan kurangnya tindak lanjut atas laporan pelanggaran. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem whistleblowing tergantung pada adanya sistem pelaporan dan komitmen organisasi buat melindungi dan menindaklanjuti laporan secara profesional.

Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengendalian internal tidak mengurangi kecurangan laporan keuangan. Hasil ini memperlihatkan bahwa tanpa penerapan yang efektif, prosedur dan sistem pengendalian internal tidak akan cukup buat mengurangi tingkat *fraud*.

Secara teoritis, pengendalian internal yang baik seharusnya dapat mengurangi kemungkinan *fraud* dengan membagi fungsi, memberikan otorisasi buat transaksi, memberikan dokumentasi yang memadai, dan melakukan pengawasan yang konsisten. Namun, pengendalian internal tidak dapat mencegah penyimpangan sebab biasanya hanya merupakan tugas administratif formal.

Dalam PT Pegadaian, situasi ini dapat disebabkan oleh *overhead* manajemen, pelaksanaan pengawasan yang kurang efektif, atau kepercayaan yang tinggi terhadap prosedur yang telah dilaksanakan. Dalam kasus ini, pengendalian internal belum sepenuhnya dilangsungkan buat mencegah penipuan. Selain itu, ketika teknologi berkembang dan transaksi menjadi lebih kompleks, mekanisme pengendalian saat ini mungkin tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang muncul.

Perusahaan harus melakukan evaluasi pengendalian internal yang efektif secara berkala, menurut hasil riset ini. Buat meningkatkan efektivitas pengendalian internal, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil, seperti meningkatkan fungsi audit internal, meningkatkan kebisaan pegawai, menggunakan teknologi pengawasan berbasis digital, dan membangun sistem pengawasan terus menerus.

Studi sebelumnya (Makarimovic, 2022; Destiyana et al., 2024; Nugroho & Afifi, 2022; Ramlah et al., 2023; Saputra & Rosharlianti, 2025; dan Monoarfa, 2023) menemukan bahwa pengendalian internal sangat penting buat mencegah penipuan. Studi memperlihatkan bahwa pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan intervensi dengan meningkatkan pengawasan dan membatasi akses ke proses pelaporan keuangan.

Namun, penelitian Destiyana et al., (2024) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak selalu efektif dalam mencegah *fraud* jika tidak didukung oleh budaya organisasi yang kuat dan komitmen manajemen buat menerapkan sistem pengawasan secara teratur. Ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian internal lebih dipengaruhi oleh kualitas implementasi daripada keberadaan sistem.

Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen perusahaan yang baik baik dan signifikan mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasilnya memperlihatkan bahwa kemungkinan bahwa laporan keuangan dimanipulasi lebih kecil jika prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik.

Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran ialah prinsip yang membantu menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap tindakan manajemen. GCG dalam teori agensi berfungsi sebagai mekanisme buat mengurangi kepentingan yang bertentangan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Ini memungkinkan pengurangan perilaku oportunistik.

Hasil riset ini memperlihatkan betapa pentingnya bagi PT Pegadaian buat memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses bisnis perusahaan. Buat meningkatkan kemandirian pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi informasi, memperjelas siapa yang bertanggung jawab apa, dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban di setiap tingkatan organisasi, manajemen harus bertanggung jawab.

Hasil riset ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Destiyana et al., 2024; Farochi & Nugroho, 2022; Lindasari, 2025; Nugroho & Afifi, 2022; Pramesti et al., 2025; Saputra & Rosharlianti, 2025) yang menemukan bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi organisasi, sehingga mengurangi tingkat penipuan.

Namun, penelitian Rohmatin et al., (2021) memperlihatkan bahwa GCG tidak selalu berdampak terhadap pencegahan *fraud* jika penerapan hanya formalitas buat memenuhi peraturan. Hasil yang berbeda memperlihatkan bahwa komitmen manajemen dan budaya organisasi buat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara nyata dalam operasi perusahaan sangat mempengaruhi keberhasilan GCG.

Komite audit terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa komite audit tidak melakukan kecurangan laporan keuangan secara signifikan. Hasilnya memperlihatkan bahwa komite audit tidak dapat mencegah penipuan di perusahaan. Secara teoritis, komite audit bertanggung jawab buat mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal, kualitas pengendalian internal, dan prosedur pelaporan keuangan. Namun, kinerja fungsi tersebut sangat bergantung pada independensi, kebisaan, dan tingkat pengawasan yang dilangsungkan.

Kondisi ini dapat memperlihatkan bahwa di PT Pegadaian, fungsi komite audit lebih berkonsentrasi pada kepatuhan dan evaluasi laporan daripada terlibat langsung dalam proses pencegahan *fraud*. Selain itu, efektivitas pengawasan yang dilangsungkan dapat dipengaruhi oleh rapat yang tidak efektif atau jumlah anggota komite audit yang terbatas.

Hasil riset ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Riyanti, 2024; Safitri & Rani, 2022), yang menemukan bahwa komite audit tidak punya kekuatan yang signifikan buat mencegah *fraud*. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya (Masthura et al., 2025; Putri & Hendrawati, 2025; Indarti., 2024), yang menemukan bahwa komite audit dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan menurunkan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian yang

berbeda memperlihatkan bahwa kinerja komite audit lebih dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan daripada adanya komite audit secara resmi dalam struktur organisasi.

Moderasi Komite Audit kepada *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan laporan keuangan cenderung diperlemah ketika komite audit ada. Hasilnya memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian internal di PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat lebih dipengaruhi oleh seberapa baik pengendalian sehari-hari dijalankan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, dan pengawasan yang dilangsungkan oleh unit kerja terkait daripada tingkat partisipasi komite audit.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa komite audit masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam praktiknya, unit pengendalian internal, audit internal, dan komite audit melakukan fungsi pengawasan secara bersamaan. Ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan duplikasi aktivitas pengawasan. Akibatnya, meskipun perusahaan punya komite audit, pengendalian internal tidak berhasil mencegah *fraud*.

Hasil ini memperlihatkan kepada PT Pegadaian bahwa unit pengendalian internal, audit internal, dan komite audit harus punya pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini dilangsungkan agar masing-masing unit pengawasan dapat bekerja sama dengan baik dan mencegah inefisiensi. Fungsi strategis seperti evaluasi efektivitas pengendalian, pemantauan risiko, dan memberikan saran kepada dewan komisaris tentang bagaimana meningkatkan sistem pengendalian perusahaan harus menjadi fokus utama komite audit.

Hasil riset ini sejalan dengan penelitian Imam Kampono & Nur, (2025) yang menemukan bahwa kehadiran komite audit tidak selalu membuat pengendalian internal lebih efektif dalam mencegah *fraud*. Namun, hasil riset ini berbeda dengan penelitian Nugroho dan Afifi, (2022) yang menemukan bahwa perusahaan dengan komite audit yang aktif dan independen punya sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam mencegah *fraud*. Hasil yang berbeda ini diduga dipengaruhi oleh tingkat autonomi komite audit, tingkat koordinasi fungsi pengawasan, dan seberapa efektif tugas komite audit dilaksanakan di setiap organisasi.

.

Moderasi Komite Audit Kepada Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan laporan keuangan cenderung diperlemah ketika komite audit ada. Hasilnya memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian internal di PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat lebih dipengaruhi oleh seberapa baik pengendalian sehari-hari dijalankan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, dan pengawasan yang dilangsungkan oleh unit kerja terkait daripada tingkat partisipasi komite audit.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa komite audit masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam praktiknya, unit pengendalian internal, audit internal, dan komite audit melakukan fungsi pengawasan secara bersamaan. Ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan duplikasi aktivitas pengawasan. Akibatnya, meskipun perusahaan punya komite audit, pengendalian internal tidak berhasil mencegah *fraud*.

Hasil ini memperlihatkan kepada PT Pegadaian bahwa unit pengendalian internal, audit internal, dan komite audit harus punya pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini dilangsungkan agar masing-masing unit pengawasan dapat bekerja sama dengan baik dan mencegah inefisiensi. Fungsi strategis seperti evaluasi efektivitas pengendalian, pemantauan risiko, dan memberikan saran kepada dewan komisaris tentang bagaimana meningkatkan sistem pengendalian perusahaan harus menjadi fokus utama komite audit.

Hasil riset ini sejalan dengan penelitian Imam Kampono & Nur, (2025) yang menemukan bahwa kehadiran komite audit tidak selalu membuat pengendalian internal lebih efektif dalam mencegah *fraud*. Namun, hasil riset ini berbeda dengan penelitian Nugroho & Afifi, (2022) yang menemukan bahwa perusahaan dengan komite audit yang aktif dan independen cenderung punya sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam mencegah *fraud*. Hasil yang berbeda ini diduga

dipengaruhi oleh tingkat autonomi komite audit, tingkat koordinasi fungsi pengawasan, dan seberapa efektif tugas komite audit dilaksanakan di setiap organisasi..

Moderasi Komite Audit Kepada *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan komite audit tidak bisa meningkatkan pengaruh penerapan sistem manajemen perusahaan yang baik terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan di Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero). Hasilnya memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan perusahaan yang sudah ada telah dilangsungkan buat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan demikian, komite audit belum membantu mencegah penipuan laporan keuangan.

Hasil ini memperlihatkan bahwa PT Pegadaian memerlukan peningkatan kualitas pengawasan, evaluasi implementasi tata kelola perusahaan, dan keterlibatan yang lebih aktif dalam pengawasan proses pelaporan keuangan dan manajemen risiko *fraud* selain mematuhi peraturan. Dengan demikian, komite audit dapat memperlihatkan betapa efektifnya menerapkan pemerintahan perusahaan yang baik buat mencegah kecurangan laporan keuangan.

Penelitian Riyanti, (2024) menemukan bahwa komite audit tidak dapat meningkatkan dampak mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pencegahan *fraud* sebab fungsi pengawasan dilangsungkan oleh mekanisme organisasi lainnya. Imam Kampono & Nur, (2025) menemukan temuan serupa, menyatakan bahwa kinerja komite audit sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, bukan hanya posisinya sebagai lembaga tata kelola perusahaan.

Namun, temuan riset ini tidak sejalan dengan penelitian Nugroho & Afifi, (2022) yang menemukan bahwa komite audit dapat meningkatkan pengaruh pemerintahan perusahaan yang baik terhadap pencegahan penipuan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi laporan keuangan. Menurut penelitian Putri & Hendrawati, (2025) organisasi yang punya komite audit yang aktif, independen, dan berpengalaman cenderung punya tingkat tata kelola yang lebih baik dalam mencegah *fraud*. Selain itu, penelitian Santi & Wafa, (2024) menemukan bahwa partisipasi komite audit dalam proses evaluasi risiko dan pengawasan pelaporan keuangan dapat meningkatkan efisiensi penerapan manajemen perusahaan yang baik.

Hasil penelitian yang berbeda diduga disebabkan oleh berbagai tingkat independensi komite audit, kompetensi anggota, frekuensi rapat, dan keterlibatan komite audit dalam proses pengawasan perusahaan. Buat PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat, audit internal, manajemen risiko, dan dewan komisaris mungkin melakukan tugas pengawasan dengan cukup baik. Oleh sebab itu, tidak ada bukti tambahan bahwa keberadaan komite audit memperkuat hubungan antara manajemen perusahaan yang baik dan pencegahan kecurangan laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian, *whistleblowing system* dan *good corporate governance* berperan dalam mendukung pencegahan kecurangan laporan keuangan melalui peningkatan transparansi dan pengurangan peluang terjadinya *fraud*. Sementara itu, pengendalian internal belum memperlihatkan peran yang optimal dalam mendukung pencegahan kecurangan laporan keuangan.

Komite audit tidak terbukti memperkuat hubungan antara *whistleblowing system* dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Namun, komite audit memperlihatkan pengaruh moderasi yang signifikan dengan arah negatif pada hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan laporan keuangan, yang mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit belum bisa mengoptimalkan efektivitas pengendalian internal dalam mendukung pencegahan *fraud.*

Riset ini punya keterbatasan sebab hanya menggunakan beberapa variabel tertentu dan mengandalkan data persepsi responden melalui kuesioner, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan buat menambahkan variabel lain yang relevan serta mempertimbangkan karakteristik komite audit guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

SARAN

Saran Teoritis

Riset ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur terkait pencegahan kecurangan laporan keuangan dengan menguji pengaruh *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good corporate governance* dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *whistleblowing system* dan *good corporate governance* punya peran penting dalam meningkatkan pencegahan kecurangan laporan keuangan. Temuan ini juga mendukung penggunaan teori agensi dalam menjelaskan pentingnya mekanisme pengawasan dan tata kelola perusahaan dalam mengurangi potensi terjadinya konflik kepentingan dan tindakan *fraud*.

Saran Praktis

Berlandaskan hasil penelitian, organisasi perlu meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* dan memperkuat pengendalian internal agar dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. Manajemen juga diharapkan dapat menerapkan *good corporate governance* secara konsisten serta meningkatkan peran komite audit melalui peningkatan kompetensi, independensi, dan efektivitas pengawasan. Selain itu, regulator diharapkan dapat menyusun kebijakan yang mendukung sistem pengawasan yang lebih efektif buat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

REFERENSI

Adawiyah, Rofiana, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. "Literature review: pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan." *Jurnal Economina* 2.6 (2023): 1331-1342. https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.606

Aghnia, S.-. (2021). Pengaruh Audit Forensik Terhadap Fraud yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 85–92. https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.3126

Andeskara, S. P., & Fachriyah, N. (2023). Peran Audit Internal dalam Mencegah Fraud untuk Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Kasus pada PT Bukit Asam Tbk). *Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. https://doi.org/10.21776/tiara.2023.1.1.26

Angraini, H. N., Putri, N. F., Desiska, W. E., & Hukum, F. (2025). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Framework pada Firma Hukum. *Indonesian Journal of Auditing and Accounting, 2*(2), 38-49. https://doi.org/10.71188/ijaa.v2i2.147

Aryani, A., & Fitri, F. (2023). Pencegahan Kecurangan: Apakah Whistleblowing System, Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, dan Integritas Penting?. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i2.24929

Ayuni, T. W., Hou, A., & Razaq, M. R. (2024). The Effect of Internal Audit and Whistleblowing System on Fraud Prevention at PT. PLN (Persero) UP3 Binjai. *Journal of Finance Integration and Business Independence*. https://doi.org/10.64276/jofibi.v1i1.10

Brief, A. P., Motowidlo, S. J., & Motowidlo, S. J. (1986). *Prosocial Organizational Behaviors*. *11*(4), 710–725. https://doi.org/10.5465/amr.1986.4283909

Budiman, M., Anwar, C., & Sudjono, S. (2022). Factors Affecting Fraud Prevention and Its Implication to the Quality of Financial Statements. *Journal of Applied Finance & Accounting*. https://doi.org/10.21512/jafa.v8i1.6858

Burahman, H., Ahmar, N., & Syam, A. (2025). Fraud Prevention in the Perspective of Internal Audit, Internal Control, Whistleblowing System, and Professional Ethics in Palm Oil Company. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i11.3035

COSO. (2013). *Coso Framework*. https://www.coso.org/guidance-on-ic

Destiyana, A., Yassarah, F. S., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh good corporate governance, pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(3), 27-39. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2528

Dina, N., Basori, M., Intan, Lusi, R., & Adiba. (2025). *Penerapan Gcg , Audit Internal , Dan Whistleblowing System Sebagai Strategi Pencegahan Fraud Pada PT.XYZ*. *5*, 269–280. https://doi.org/ 10.59889/embiss.v5i3.394

Dwianto, A., Puspitasari, D., & Setiawati, E. (2024). *Moderasi Komite Audit Sebagai Peredam Kecurangan Pelaporan Keuangan*. *8*, 839–860. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1899

Fathoni, A., Salsabilah, J., Marinda, N., & M. (2024). Pengaruh Whistleblowing System dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*.

https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1815
Fatmawati, A., & Hidayah, N. (2024). Analisis Penerapan Whistleblowing System dalam Pencegahan terhadap Kecurangan (Fraud) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung. *LAND Journal*. https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3639
Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *6*(1), 86–92. https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.46071
Ghozali, I., Achmad, T., H., & Pamungkas, I. D. (2025). Mitigating Financial Statement Fraud through Fraud Heptagon, Digital Forensics, and Risk Management: Evidence from Indonesia's State-Owned Enterprises. *International Journal of Accounting and Economics Studies*. https://doi.org/10.14419/3mr8v947
Gulo, A., & Siregar, R. A. (2023). Analisis Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada PT. Bersama Ozora Sukses Gadai. *Journal of Economics and Management Scienties*. https://doi.org/10.37034/jems.v5i3.20
Hair, J., & Alamer, A. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in Second Language and Education Research: Guidelines Using an Applied Example*. *Research Methods in Applied Linguistics, 1*, 100027. https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027
Hamilah, H., Suratman, A., & Alam, S. (2022). The Effectiveness of the Internal Whistleblowing System in Fraud Detection and Prevention (Empirical Study at PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*. https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i6.1142
Handoko, B. L., & Amelia, R. (2021). Implementation of Good Corporate Governance, Internal Audit, Whistle-Blowing System for Fraud Prevention in State-Owned Enterprise. *Proceedings of the 2021 12th International Conference on E-business, Management and Economics*. https://doi.org/10.1145/3481127.3481144
Icek, A. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 179-211. https://cir.nii.ac.jp/crid/1571417125894583808
Imam Kampono, Y., & Nur, I. I. U. (2025). *Analisis Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Komite Audit Sebagai Variable Moderas (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN Yang terdaftar Di BEI Tahun 2019-2023*. *6*(1), 89–101. https://doi.org/10.55122/jabisi.v6i1.1747
Indarti, I., Aljufri, A., & Apriliyani, I. B. (2024). Peran Komite Audit Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Anti-Fraud Awareness Dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *7*(1), 1-10. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v7i1.1446
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In Corporate governance (pp. 77-132). Gower
Johan, A., Khairusy, M., Nugraha, N., & Sriwardini, S. (2022). Preventing Fraud through Internal Audit and Whistleblowing System. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*. https://doi.org/10.36555/jasa.v6i2.1769
Lindasari, N. M. (2025). *Pengaruh Financial Target , Good Corporate Governance , dan Whistleblowing System Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*. *5*, 394–404. https://doi.org/10.56456/jebdeker.v5i2.836
Lubis, A. F., & Maisyarah, R. (2026). The Effect of Pressure, Opportunity, Rationalization, Competence, and Arrogance on the Potential for Fraudulent Financial Reporting at PT Pegadaian, Medan. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*. https://doi.org/10.61994/equivalent.v4i1.1802
Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, *1*(1), 23–36. https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752
Maiviza, D. N., & Kusumah, W. R. (2025). Analysis of Internal Audit, Whistleblowing System and Organizational Culture in Fraud Prevention (A Case Study of PT Pos Indonesia). *Journal of Accounting and Finance Management*. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2333
Makarimovic, A., Setyanto, E., & Handayani, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Dan

Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, *5*(2), 167-176. https://doi.org/10.32663/jaz.v5i2.2952

Mandal, A., & S., A. (2023). Preventing Financial Statement Fraud in the Corporate Sector: Insights from Auditors. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. https://doi.org/10.1108/jfra-02-2023-0101

Masthura, & Nadirsyah & Indriani, M. (2025). *Peran Komite Audit Dalam Memoderisasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Di Indonesia*. *June*, *9*(1)1–18. https://doi.org/10.33603/jka.v9i1.9361

Maulana, M. A., & Samryn, L. M. (2025). *Pengaruh Stabilitas Keuangan , Komite Audit , dan Moderasi Peran Kap Big 4 Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan LQ-45 Periode 2019 – 2023)*. *4*(11), 5254–5264. https://doi.org/10.58344/jii.v4i11.7192

Maulidi, A., Girindratama, M. W., Putra, A., Sari, R. P., & Nuswantara, D. A. (2024). Qualitatively Beyond the Ledger: Unravelling the Interplay of Organisational Control, Whistleblowing Systems, Fraud Awareness, and Religiosity. *Cogent Social Sciences, 10*. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2320743

Mawardi, R., Soimah, S., Shaliha, K. A., Septian, W. E., & Haron, R. (2026). Analysis of the Use of the Fraud Hexagon Model in Detecting Fraud in State-Owned Enterprises in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. https://doi.org/10.30813/jab.v19i1.8557

Mourer, M. (2026). The Role of Whistleblowing System in Fraud Mitigation: The Theory of Planned Behavior (TPB) Approach. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.6059394

Muhammad Darwin, Marianne Reynelda Mamondol, Salman Alparis Sormin, Yuliana Nurhayati, Hardi Tambunan, Diana Sylvia, Made Dwi Mertha Adyana, Budi Prasetiyo Pasionista Vianitati, A. A. G. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*.

Mulyawati, D. A. M., Kusumawati, N. P. A., & Ayu, P. C. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Abiansemal. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, *6*(1), 71-78. https://doi.org/10.32795/hak.v6i1.7513

Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). *Efective Whistleblowing*. *Academy of Management Review 20*(3), 679–708. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334

Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, *2*(3), 301–316. https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42

OECD. (2015). *Corporate Governance Factbook* (Issue March).

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334

Pramesti, A. Y., Endah, N., Hidayah, F., & Control, I. (2025). *Pengaruh Internal Control , GCG , Budaya Organisasi , dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa di Sragen*. *4*(3), 4768–4780. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8771

Pratiwi, A., & Nugroho, L. (2025). Preventing Financial Statement Fraud in State-Owned Enterprises: The Strategic Role of the Audit Committee in Moderating Financial Pressure and Corporate Governance. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*. https://doi.org/10.36766/dv5nqv89

Puspita, D. (2021). Pengaruh peran komite audit, pelaksanaan tata kelola perusahaan dan whistleblowing system terhadap kecurangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, *4*(1), 178-183. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11025

Putri, Y., & Hendrawati, E. (2025). *Pencegahan Kecurangan (Fraud) Perusahaan Perbankan : Peran Komite Audit , Audit Internal , dan Whistleblowing System*. *6*(2). https://doi.org/10.30595/ratio.v6i2.25289

Rafada, E., & Muhammad, R. (2022). *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance, Whistleblowing System dan Board Gender Diversity Terhadap Tindakan Fraud* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.23469

Ramlah, S., Saleh, S. M., Nur, S., Said, R., Gustiningsih, D. A., & Kamal, A. (2023). *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud*. *8*(2), 259–270.

https://doi.org/10.37531/mirai.v8i2.4924

Riane, R. A., & Mutmainah, S. (2025). *Pengaruh whistleblowing dan pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi*. *14*(3), 1–13. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/52915

Riyanti, A. (2024). *Komite Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesulitan Keuangan Dan Manajemen Laba Terhadap Kecurangan Laporann Keuangan*. *24*(02), 1–9. Retrieved from https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12345

Rizqa, R. (2019). *Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25772

Ramadhani, M. A., & Trisnaningsih, S. (2023). Analysis of the Role Whistleblowing System for Fraud Prevention: Theory of Planned Behavior. *International Journal of Management Science and Information Technology*. https://doi.org/10.35870/ijmsit.v3i1.860

Rasyidah, R., Anwar, A., & Hamzah, H. (2024). Analysis of Detecting Potential Financial Statement Fraud in State-Owned Enterprises (SOEs) Using the Fraud Hexagon. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*. https://doi.org/10.26618/inv.v6i2.15686

Rizki, R. M., & Dewi, L. S. (2025). Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode Customer dan Enhanced Due Diligence di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1533

Rohmatin, B. L., Apriyanto, G., & Zuhroh, D. (2021). The role of good corporate governance to fraud prevention: an analysis based on the fraud pentagon. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *25*(2), 280-294. https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5554

Safitri, A. E., & Rani, P. (2022). *Peran Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dimoderasi Whistleblowing System*. *19*(1). Retrieved from https://journal.unas.ac.id/akunnas/article/view/1553

Saida, S., Maslichah, M., & Fakhriyyah, D. D. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *12*(02), 614-624. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/20915

Saikhu, S., Suhardjanto, D., Probohudono, A. N., & Widarjo, W. (2025). A Systematic Review of Fraud: An Overview of State-Owned Enterprises. *Cogent Business & Management, 12*. https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2518493

Santi, V. L., & Wafa, Z. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komite Audit, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *19*(3), 919-936. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=80794918

Saputra, A. D., & Rosharlianti, Z. (2025). *Pengaruh Pengendalian Internal , Audit Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud*. *5*(1), 183–196. https://doi.org/10.37481/jmeb.v5i1.1188

Sari, K. K. (2024). Whistleblowing System: The Effective Solution to Prevent Financial Accounting Fraud?. *Owner*. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2316

Sd, W., & Monoarfa, R. (2023). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan*. *8*(2), 115–122. Retrieved from https://doi.org/10.37531/mirai.v8i2.4565

Septiani, Y., Ariibe, E., & Diansyah, R. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru). Jurnal Teknologi Dan Open Source, 3(1), 131-143. Retrieved from https://ejournal.uniks.ac.id/Index.Php/Jtos/Article/Download/560/398

Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2021). The roles of whistleblowing system and fraud awareness as financial statement fraud deterrent. *International Journal of Ethics and Systems*, *37*(3), 370–389. https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2020-0140

Sitorus, S., & Prasetyo, B. (2024). Perlindungan Hukum terhadap PT Pegadaian atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Ktg.). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10802

Suasri, E., Rininda, B. P., Amelia, N., Lestari, A., Amelia, D., & Utami, A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi The Influence Of Internal Control Systems And Whistleblowing Systems On Fraud Prevention With Individual Morality As A Moderating Variable. *Monex-Journal Of Accounting Research*, *14*(1). Retrieved from https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.7805

Sunantar, B., Laviuna, A., Hasrun, A., Ahriani, A., & Obi, L. O. (2025). Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pembiayaan Yang Terdaftar Di BEI TAHUN 2020-2024. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, *8*(2), 135-144. https://doi.org/10.35914/jemma.v8i2.3320

Sudjono, A. (2023). Do Good Corporate Governance and Whistleblowing Systems in Bank Industry Effectively Support Fraud Detection and Prevention?. *Asia Pacific Fraud Journal*. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.296

Sumanto, A., & Zuhdi, A. I. (2026). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. https://doi.org/10.69714/amjyvh57

Syafitri, S. S., & Syafdinal, S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, *7*(1), 866-878. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1466

Tanjaya, A., & Kwarto, F. (2022). Tata Kelola Perusahaan dalam Mengurangi Kecurangan Laporan Keuangan (Systematic Literature Review dengan Metode Meta Sintesis). *Jurnal Akademi Akuntansi*. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.21248

Utama, K. D. S., & Astawa, I. G. P. B. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi, Good Corporate Governance, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, *10*(01), 56-67. https://doi.org/10.23887/vjra.v10i01.56315

Wang, Y., Ashton, J. K., & Liu, J. (2024). Does the Form of State Ownership and Political Connections Influence the Incidence of Financial Statement Fraud?. *The European Journal of Finance, 30*, 2111–2136. https://doi.org/10.1080/1351847x.2024.2363421

Welly, Rizkika, W., Asterina, F., & Zuraidah, I. (2024). Implementation of Internal Control, Good Corporate Governance and Whistleblowing System for Fraud Prevention. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*. https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i6-09